



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 499, 2020

DJSN. Indikator Pencapaian Kinerja. BPJS.
Penetapan. Penilaian.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pencapaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu diatur mengenai mekanisme penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5752);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
 10. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

Pasal 1

Peraturan Dewan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam melakukan penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. metode penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
 - c. aspek penilaian dan formula standar kesehatan keuangan aset;
 - d. faktor-faktor penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
 - e. sumber data;
 - f. penetapan bobot;
 - g. proses penetapan dan penilaian;
 - h. simulasi; dan
 - i. kegunaan hasil penilaian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 563), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ttd

TB ACHMAD CHOESNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR
PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menetapkan DJSN sebagai pengawas eksternal BPJS. Lebih lanjut Pasal 46 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh DJSN dan Lembaga Pengawas Independen.
2. Pengawasan Eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS.
3. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan aset BPJS dan aset DJS.
4. DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan kepada Presiden.

Pasal 44 ayat (6) UU BPJS menetapkan bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. Selanjutnya Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa penetapan target kinerja dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, DJSN memandang perlu untuk menyusun pedoman penetapan dan penilaian

kinerja BPJS, meliputi tingkat kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja.

Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hasil kinerja dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPJS. Data hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan terkait untuk menentukan besaran insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS belum memuat indikator pencapaian kinerja untuk Program Jaminan Pensiun yang merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, seiring dengan dinamika penyelenggaraan program jaminan sosial dipandang perlu mengembangkan indikator pencapaian kinerja BPJS sesuai dengan kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS adalah:

1. Sebagai panduan bagi DJSN dalam menilai laporan kinerja BPJS.
2. Sebagai alat yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.
3. Sebagai acuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh jajaran BPJS mengenai metode dan tahapan proses penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja sebagai perwujudan implementasi visi, misi dan tujuan BPJS di tingkat operasional.
4. Sebagai acuan bagi BPJS untuk meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) dengan cara meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan SJSN.

Tujuan Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS adalah agar:

1. Pengukuran dan penilaian kinerja BPJS oleh institusi pengawas BPJS dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
2. Sistem pemberian insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi oleh Pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
3. BPJS memiliki standar acuan objektif dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

C. Pengertian – Pengertian

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3. Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS adalah acuan bagi pengawas BPJS dalam menetapkan target dan melakukan pengukuran kinerja BPJS dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BPJS.
4. Indikator Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut IPK adalah formula yang memuat kunci utama untuk mengukur kinerja.
5. Sistem *Balance Score Card* yang selanjutnya disingkat BSC adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan perspektif yang disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program BPJS, dan didasarkan pada 3 (tiga) azas dan 9 (sembilan) prinsip SJSN.
6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
7. Aset Dana Jaminan Sosial adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang merupakan milik peserta.

8. Aset BPJS adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang merupakan milik lembaga BPJS.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
10. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional.

E. Kerangka Umum Penetapan dan Penilaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan DJSN terhadap BPJS, DJSN melakukan penetapan dan penilaian kinerja BPJS. Untuk keperluan penilaian kinerja tersebut, Direksi BPJS menyampaikan laporan evaluasi kinerja pengelolaan program dan keuangan BPJS yang telah diaudit oleh KAP kepada DJSN.

Penetapan dan Penilaian Kinerja BPJS dilakukan terhadap:

- a. Standar Kesehatan Keuangan Aset; dan
- b. Indikator Pencapaian Kinerja.

Indikator sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini merupakan indikator yang ideal untuk masing-masing BPJS. Untuk fleksibilitas implementasi Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS, dibutuhkan penetapan target standar kesehatan keuangan aset, Indikator Pencapaian Kinerja BPJS, dan bobot setiap indikator yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan DJSN berdasarkan hasil sidang pleno DJSN.

Dalam menetapkan standar kesehatan keuangan aset, IPK BPJS, dan bobot setiap indikator tersebut, DJSN bersama BPJS dapat memilih dan menyesuaikan dengan sasaran strategis dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) masing-masing BPJS serta kemampuan pengelolaan program pada setiap tahunnya.

Angka-angka penetapan dan penilaian IPK yang disajikan dalam pedoman ini disesuaikan dengan data yang tersedia. Dalam hal tidak ada data, penyajian angka-angka untuk penetapan target dan realisasi berdasarkan asumsi.

BAB II
METODE PENETAPAN DAN PENILAIAN
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Metode yang digunakan dalam penetapan dan penilaian IPK adalah sistem *Balance Score Card* (BSC), yaitu suatu metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, perspektif pengukuran kinerja disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program Jaminan Sosial, dan didasarkan pada 3 (tiga) azas dan 9 (sembilan) prinsip SJSN.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

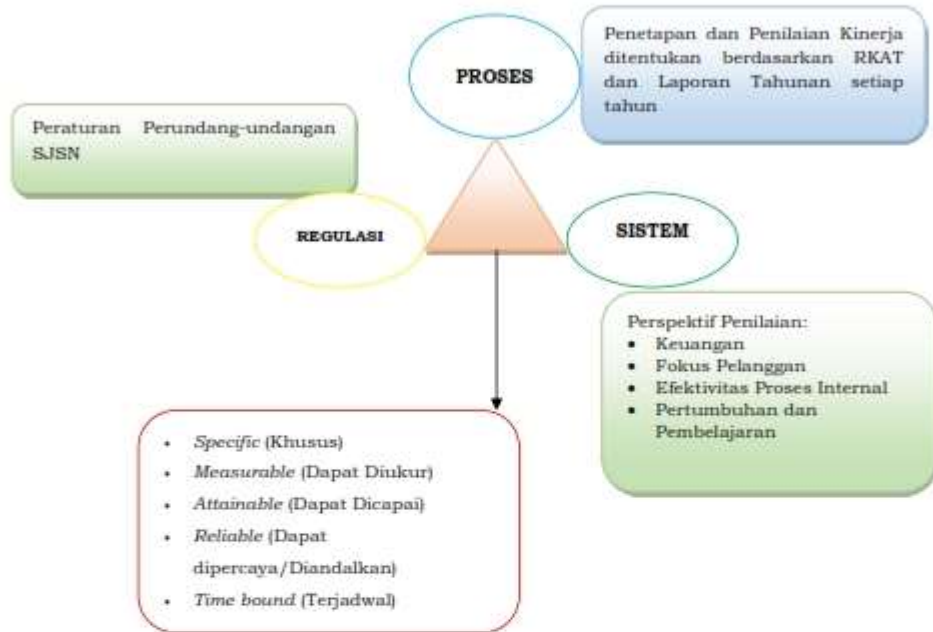
1. Keuangan, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dari aspek keuangan;
2. Pelanggan, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang berorientasi kepada kepuasan peserta;
3. Proses Internal, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang terfokus kepada berbagai proses internal BPJS; dan
4. Pertumbuhan dan Pembelajaran, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dalam menciptakan pertumbuhan dan pembelajaran dengan kesiapan organisasi, SDM, teknologi informasi dan tata kelola.

Untuk efektivitas penilaian IPK, perlu memperhatikan prinsip SMART, yaitu *Specific* (Khusus), *Measurable* (Dapat Diukur), *Attainable* (Dapat Dicapai), *Reliable* (Dapat dipercaya/Diandalkan) dan *Time bound* (berbasis waktu).

Penetapan dan penilaian IPK BPJS dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terkait dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan program jaminan sosial, serta mengacu pada RKAT dan laporan tahunan BPJS.

Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja adalah mengukur tingkat keberhasilan BPJS dengan pendekatan sebagaimana pada gambar 1 :

Gambar 1. Pendekatan Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)



BAB III
ASPEK PENILAIAN DAN FORMULA
STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET

A. ASPEK PENILAIAN

1. BPJS Kesehatan

Aspek penilaian dan formula standar kesehatan keuangan aset Jaminan Sosial Kesehatan meliputi:

- 1) Likuiditas (%)

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- 2) Solvabilitas (%)

$$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$$

- 3) Yield on Investment Aset BPJS (%)

$$\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata – Rata Investasi Netto (t – 1 & t berjalan)}}$$

- 4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

2. BPJS Ketenagakerjaan

Aspek penilaian dan formula tingkat kesehatan keuangan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Likuiditas (%)*)

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- 2) Solvabilitas (%)*)

$$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$$

- 3) Yield on Investment (%)*)

$$\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata – Rata Investasi Netto (t – 1 & t berjalan)}}$$

- 4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$
- 5) Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun (%)

$$\frac{\text{Jumlah Aktiva Bersih}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$$
- 6) Klaim Rasio Dana JKK

$$\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$$
- 7) Klaim Rasio Dana JKm

$$\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$$
- 8) Kemampuan Pembayaran JHT
 a.
$$\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jatuh Tempo}}$$

 b.
$$\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$
- 9) Efektivitas Pembayaran JHT (%)

$$\frac{\text{Jumlah JHT yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah JHT yang Jatuh Tempo}}$$
- 10) Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) (%)

$$\frac{\text{Aktiva Bersih (t)} - \text{Aktiva Bersih (t - 1)}}{\text{Aktiva Bersih (t - 1)}}$$
- 11) Efektivitas Pembayaran Pensiun (%)

$$\frac{\text{Jumlah Pensiun yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah Pensiun yang Jatuh Tempo}}$$
- 12) Kolektabilitas Iuran

$$\frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Pendapatan Iuran}}$$

Keterangan:

**) berlaku untuk Aset BPJS dan Aset DJS*

B. FORMULA PENILAIAN

Penilaian indikator tingkat kesehatan keuangan dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target, dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Likuiditas (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 2) Solvabilitas (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 3) Yield on Investment (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

- 5) Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 6) Klaim Rasio Dana JKK

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 7) Klaim Rasio Dana JKm

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 8) Kemampuan Pembayaran JHT (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 9) Efektivitas Pembayaran JHT (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 10) Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 11) Efektivitas Pembayaran Pensiun (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 12) Kolektabilitas Iuran

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

BAB IV
FAKTOR – FAKTOR PENETAPAN DAN PENILAIAN
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Faktor – faktor dalam Penetapan IPK dilihat dari 4 perspektif, masing-masing perspektif terdiri dari beberapa sasaran strategis dengan beberapa indikator.

A. BPJS KESEHATAN

a. Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis perspektif pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:

- 1) Tercapainya jumlah peserta JKN (Jiwa)
Dihitung berdasarkan total jumlah peserta yang ditargetkan dalam RKAT.
- 2) Tercapainya penambahan peserta baru (Jiwa)
Dihitung berdasarkan jumlah penambahan peserta baru (PBI Daerah, Non-PBI dan Non-PPU Pemerintah) yang ditargetkan dalam RKAT.
- 3) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP (%)
Dihitung berdasarkan perbandingan terhadap jumlah FKTP yang telah memenuhi ketentuan Pemerintah.
- 4) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL (%)
Dihitung berdasarkan perbandingan terhadap jumlah FKRTL yang telah memenuhi ketentuan Pemerintah.
- 5) terselesainya pembayaran tagihan rumah sakit (%)
$$\frac{\text{Jumlah Tagihan Rumah Sakit yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah Tagihan yang Diajukan oleh Rumah Sakit}}$$

b. Efektivitas pengelolaan layanan, dengan IPK meliputi:

- 1) Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP (Jiwa)
$$\frac{\text{Jumlah Peserta}}{\text{Jumlah Dokter Penuh Waktu yang Bekerjasama dengan BPJS}}$$
- 2) Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit (Jiwa)
$$\frac{\text{Jumlah Peserta}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$$

- 3) Tercapainya Rasio Klaim (%)

$$\frac{\text{Realisasi Biaya Pelayanan}}{\text{Realisasi Penerimaan Iuran}}$$
 - 4) Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (Unit)

Dihitung berdasarkan target akumulasi unit pelayanan BPJS dalam RKAT.
- c. Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi:
- 1) Tingkat kepuasan peserta (%)

Mengacu pada hasil survey kepuasan peserta (survey populasi)
 - 2) Pengaduan peserta di Kontak Layanan BPJS Kesehatan yang diselesaikan (%)

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}}$$
 - 3) Pengaduab peserta di faskes yang ditindaklanjuti (%)

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduab yang Masuk}}$$

b. Perspektif Keuangan

Sasaran strategis perspektif keuangan adalah efektivitas pengelolaan keuangan, dengan IPK meliputi:

- 1) Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset (Skor)

Mengacu pada akumulasi target tingkat kesehatan keuangan.
- 2) Tercapainya opini auditor (Skor)

Mengacu pada, Opini auditor Independen :

 - . WTP : 100
 - . WTP PP : 90
 - . WDP : 80
 - . Disclaimer/ No Opini : 50
- 3) Penerimaan iuran yang optimal (%)

$$\frac{\text{Penerimaan Iuran}}{\text{Pendapatan Iuran}}$$

c. Perspektif Proses Internal

Sasaran strategis perspektif proses internal adalah akuntabilitas pengelolaan, dengan IPK meliputi:

1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan (Skor)

Paling lambat tanggal 31 Oktober

- Diterima sebelum 31 Oktober : 120% X Bobot
- Diterima pada 31 Oktober : 100% X Bobot
- Diterima setelah 31 Oktober : 0

2) Ketetapan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun sebelumnya (Skor)

Paling lambat tanggal 30 Juni

- Diterima sebelum 30 Juni : 120% X Bobot
- Diterima pada 30 Juni : 100% X Bobot
- Diterima setelah 30 Juni : 0

3) Ketetapan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

Paling lambat tanggal 31 Juli

- Diterima sebelum 31 Juli : 120% X Bobot
- Diterima pada 31 Juli : 100% X Bobot
- Diterima setelah 31 Juli : 0

4) Keandalan database peserta (KD) (Pemadanan data dengan dukcapil/yang ada data) (%)

$$\frac{\text{Data Peserta yang Valid}}{\text{Seluruh Data Peserta}}$$

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Sasaran strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:

1) Produktivitas pegawai (a : Jiwa, b : Rp Miliar)

a)
$$\frac{\text{Jumlah Peserta}}{\text{Jumlah Pegawai}}$$

b)
$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Iuran}}{\text{Jumlah Pegawai}}$$

- 2) Employee Management Index (%)

Dihitung berdasarkan hasil survey engagement pegawai
- b. Meningkatkan utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
 - 1) Ketersediaan Sistem (%)

Dihitung berdasarkan hasil monitoring aplikasi
 - 2) Tingkat efektivitas IT Governance (Skor)

Dihitung berdasarkan standar COBIT 5
- c. Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK meliputi:
 - 1) Tercapainya skor *good governance* (GG) (Skor)

Diukur berdasarkan hasil assessment oleh BPKP/Pengawas Internal
 - 2) Tercapainya *maturity level* manajemen risiko (Skor)

Diukur berdasarkan *assessment Governance Risk and Compliance (GRC)* dengan skala 0-5

5.00 : Leadership

4.00 – 4.99 : Managed

3.00 – 3.99 : Repeatable

2.00 – 2.99 : Initial

0.00 – 1.99 : Adhoc
 - 3) Tercapainya tingkat kehandalan sistem pengendalian intern (Skor)

Diukur berdasarkan *assessment Governance Risk and Compliance (GRC)* dengan skala 0-5

5.00 : Leadership

4.00 – 4.99 : Managed

3.00 – 3.99 : Repeatable

2.00 – 2.99 : Initial

0.00 – 1.99 : Adhoc
 - 4) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
 - a) Pengawasan Internal

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$$
 - b) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$$

B. BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis perspektif pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:
 - 1) Total Peserta Aktif (Jiwa)
Akumulasi peserta aktif yang ditargetkan dalam RKAT
 - 2) Penerimaan Iuran (Rupiah)
Total iuran yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan (Cash Basis)

- b. Efektivitas pengelolaan pelayanan, dengan IPK meliputi:
 - 1) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT (Skor)
Paling lambat 5 hari kerja
 - Kurang dari 5 hari kerja : 120% X Bobot
 - 5 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 5 hari kerja : 0
 - 2) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM (Skor)
Paling lambat 3 hari kerja
 - Kurang dari 3 hari kerja : 120% X Bobot
 - 3 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 3 hari kerja : 0
 - 3) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK (Skor)
Paling lambat 7 hari kerja
 - Kurang dari 7 hari kerja : 120% X Bobot
 - 7 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 7 hari kerja : 0
 - 4) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP (Skor)
Paling lambat 15 hari kerja
 - Kurang dari 15 hari kerja : 120% X Bobot
 - 15 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 15 hari kerja : 0
 - 5) Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta (Skor)
Paling lambat 7 hari kerja
 - Kurang dari 7 hari kerja : 120% X Bobot
 - 7 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 7 hari kerja : 0

- 6) Tercapainya target jumlah unit pelayanan BPJS (Unit)
Dihitung berdasarkan target akumulasi unit pelayanan BPJS dalam RKAT.
- c. Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi (%)
- 1) Tingkat kepuasan peserta
Hasil Survey kepuasan peserta
 - 2) Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat (%)
$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Diterima}}$$
 - 3) Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat (Skor)
Paling lambat 5 hari kerja
 - Kurang dari 5 hari kerja : 120% X Bobot
 - 5 hari kerja : 100% X Bobot
 - Lebih dari 5 hari kerja : 0

2. Perspektif Keuangan

Sasaran strategis perspektif keuangan adalah efektivitas pengelolaan keuangan, dengan IPK meliputi:

- 1) Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset (Skor)
Mengacu pada akumulasi target tingkat kesehatan keuangan.
- 2) Tercapainya Opini Auditor (Skor)
Mengacu pada, Opini auditor Independen:
 - WTP : 100
 - WTP PP : 90
 - WDP : 80
 - Disclaimer/ No Opini : 50

3. Perspektif Proses Internal

Sasaran strategis perspektif proses internal adalah membangun kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan *stakeholder*, dengan IPK meliputi:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan (Skor)
Paling lambat tanggal 31 Oktober
 - Diterima sebelum 31 Oktober : 120% X Bobot
 - Diterima pada 31 Oktober : 100% X Bobot
 - Diterima setelah 31 Oktober : 0

2) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit (Skor)

Paling lambat tanggal 30 Juni

- Diterima sebelum 30 Juni : 120% X Bobot
- Diterima pada 30 Juni : 100% X Bobot
- Diterima setelah 30 Juni : 0

3) Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

Paling lambat tanggal 31 Juli

- Diterima sebelum 31 Juli : 120% X Bobot
- Diterima pada 31 Juli : 100% X Bobot
- Diterima setelah 31 Juli : 0

4) Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan keuangan aset BPJS (Skor)

Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

- Diterima sebelum tanggal 15 bulan berikutnya : 120% X Bobot
- Diterima pada tanggal 15 bulan berikutnya : 100% X Bobot
- Diterima setelah tanggal 15 bulan berikutnya : 0

5) Kehandalan database peserta (KD) (%)

$$\frac{\text{Data Peserta yang Valid}}{\text{Seluruh Data Peserta}}$$

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Sasaran strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:

1) Produktivitas pegawai (Jiwa)

$$\frac{\text{Jumlah TK peserta aktif}}{\text{Jumlah karyawan}}$$

2) Tingkat Keterikatan Pegawai (%)

Hasil survey engagement pegawai

b. Meningkatkan utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:

1) Tercapainya IT *readiness level* (Skor)

Diukur berdasarkan kesiapan IT untuk menunjang BPJS Ketenagakerjaan

2) Progres otomasi proses bisnis (Sub-sistem)

Jumlah otomasi proses bisnis yang ditargetkan

- c. Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK meliputi:
- 1) Tercapainya skor *good governance* (GG) (%)

Untuk Tahun 2019 diukur berdasarkan target dalam RKAT. Mulai tahun 2020 dihitung berdasarkan kesesuaian dengan ISSA Guidelines.
 - 2) Tercapainya *maturity* level manajemen risiko (Skor)

Dihitung berdasarkan capaian maturity level management resiko yang dihitung berdasarkan COSO ERM
 - 3) Audit Coverage oleh SPI (Auditee)

Jumlah Auditee yang ditargetkan dalam RKAT
 - 4) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
 - a) Pengawasan Internal

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$$
 - b) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$$

C. FORMULA PENILAIAN

1. BPJS KESEHATAN

a. Perspektif Pelanggan

- 1) Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:
 - a) Tercapainya jumlah peserta JKN (Jiwa)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - b) Tercapainya penambahan peserta baru (Jiwa)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - c) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - d) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- e) Terselesainya pembayaran tagihan rumah sakit (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 2) Efektivitas pengelolaan layanan, dengan IPK meliputi:

- a) Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP (Jiwa)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

- b) Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit (Jiwa)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

- c) Tercapainya Rasio Klaim (%)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

- d) Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (Unit)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 3) Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi:

- a) Tingkat kepuasan peserta (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- b) Pengaduan peserta di Kontak Layanan BPJS Kesehatan yang diselesaikan (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- c) Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

b. Perspektif Keuangan

- 1) Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 2) Tercapainya opini auditor (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 3) Penerimaan iuran yang optimal (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

c. Perspektif Proses Internal

- 1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 2) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun sebelumnya (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 3) Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 4) Keandalan database peserta (KD) (Pemadanan data dengan dukcapil/yang ada data) (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

- 1) Meningkatnya produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:

- a) Produktivitas pegawai ((1) : Jiwa, (2) : Rp Miliar)

$$(1) \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

$$(2) \frac{\text{Realisasi}}{\text{Bobot}} \times \text{Bobot}$$

- b) Employee Management Index (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 2) Meningkatnya utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:

- a) Ketersediaan Sistem (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- b) Tingkat efektivitas IT Governance (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- 3) Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK meliputi:

- a) Tercapainya skor *good governance* (GG) (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

b) Tercapainya *maturity level* manajemen risiko (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

c) Tercapainya tingkat kehandalan sistem pengendalian intern (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

d) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)

(1) Pengawasan Internal

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

(2) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

2. BPJS KETENAGAKERJAAN

a. Perspektif Pelanggan

1) Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:

a) Total Peserta Aktif (Jiwa)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

b) Penerimaan Iuran (Rupiah)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

2) Efektivitas pengelolaan pelayanan, dengan IPK meliputi:

a) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

b) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

c) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

d) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

e) Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

f) Tercapainya target jumlah unit pelayanan BPJS (Unit)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

3) Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi (%)

a) Tingkat kepuasan peserta

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

b) Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

c) Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat (Skor)

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times \text{Bobot}$$

b. Perspektif Keuangan

1) Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

2) Tercapainya Opini Auditor (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

c. Perspektif Proses Internal

1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

2) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

3) Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

4) Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan keuangan aset BPJS (Skor)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

5) Keandalan database peserta (KD) (%)

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

- 1) Meningkatkan produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:
 - a) Produktivitas pegawai (Jiwa)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - b) Tingkat Keterikatan Pegawai (%)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
- 2) Meningkatkan utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
 - a) Tercapainya IT *readiness level* (Skor)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - b) Progres otomasi proses bisnis (Sub-sistem)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
- 3) Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK meliputi:
 - a) Tercapainya skor *good governance* (GG) (%)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - b) Tercapainya maturity level manajemen risiko (Skor)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - c) Audit Coverage oleh SPI (Auditee)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - d) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
 - (1) Pengawasan Internal
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$
 - (2) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

D. KLASIFIKASI PENILAIAN

Hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan dan IPK menggunakan klasifikasi sebagaimana dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan IPK

| No | Klasifikasi | Skor |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | Sangat Sehat | $\geq 100,00$ |
| 2 | Sehat | 90,00 – 99,99 |
| 3 | Kurang Sehat | 80,00 – 89,99 |
| 4 | Tidak Sehat | 70,00 - 79,99 |
| 5 | Sangat Tidak Sehat | <70,00 |

E. KLASIFIKASI PENILAIAN AKHIR

Setelah hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan dan penilaian IPK diklasifikasikan sebagaimana pada tabel 1, dilakukan penilaian akhir dengan mengkombinasikan klasifikasi penilaian tingkat kesehatan keuangan dengan klasifikasi penilaian IPK secara proporsional. Tingkat proporsional didasarkan pada jumlah indikator yang digunakan dalam penilaian.

Sebagai contoh jika jumlah indikator tingkat kesehatan keuangan sebanyak 8 item dan jumlah indikator pencapaian kinerja sebanyak 16 item, maka porsi penilaian untuk tingkat kesehatan keuangan adalah 33,33% (dibulatkan menjadi 30%) dan porsi penilaian untuk IPK adalah 66,66% (dibulatkan menjadi 70%).

**BAB V
SUMBER DATA**

A. SUMBER DATA TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Sumber data untuk penetapan target tingkat kesehatan keuangan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sedangkan untuk penilaian, sumber data angka realisasi adalah laporan keuangan tahunan.

B. SUMBER DATA INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BPJS KESEHATAN

Sumber data untuk penetapan target dan penilaian IPK BPJS Kesehatan sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2. Sumber Data Penetapan dan Penilaian IPK BPJS Kesehatan

| No | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Tercapainya jumlah peserta JEN | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tercapainya penambahan peserta baru | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peta Jalan BPJS Kesehatan | 1. Laporan Audit Kinerja |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL | 3. Data Faskes (FKTP dan FKRTL) yang ada (Depkes, Pemda dan Asosiasi) 4. Database Faskes (FKTP dan FKRTL) yang telah bekerja sama | 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database Faskes yang bekerja sama |
| | | Terselesainya pembayaran tagihan rumah sakit | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database Penerimaan tagihan 3. Database Pembayaran tagihan | 1. Laporan Audit Keuangan dan Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database Pelayanan |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database Peserta 3. Database FKTP/Dokter | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database FKTP/Dokter |
| | | Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database Peserta 3. Database tempat tidur yang tersedia di setiap Rumah Sakit 4. Database jumlah peserta yang rawat inap di setiap Rumah Sakit | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database Peserta 4. Database tempat tidur yang tersedia di setiap Rumah Sakit 5. Database jumlah peserta yang rawat inap di setiap Rumah Sakit |
| | | Tercapainya Rasio Klaim | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Keuangan dan Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (akumulasi) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Keuangan dan Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |

| No | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|--|--|--|---|--|
| a | b | c | d | e |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat Kepuasan Peserta | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Konsultan Independen tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| | | Pengaduan peserta di kontak layanan BPJS Kesehatan | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Konsultan Independen tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| | | Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| II. Perspektif Keuangan | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tercapainya Opini Auditor | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Penerimaan iuran yang optimal | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | |
| 1 | Akuntabilitas Pengelolaan | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Surat Penyampaian Rancangan RKAT Kepada Kementerian Keuangan |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun sebelumnya | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Surat Pengantar/Management Letter Auditor Eksternal 4. Laporan Auditor Eksternal |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Klipping Media Cetak 4. Website Perusahaan |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD)(Pemadanan data dengan dulcapil/yang ada data) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database Peserta | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Database Peserta |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database peserta 3. Database karyawan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database peserta 4. Database karyawan |
| | | Employee management index | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Konsultan Independen tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Ketersediaan Sistem | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Audit IT tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Audit IT |
| | | Tingkat Efektivitas IT Governance | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Audit IT tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Audit IT |

| No | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|--|---|---|--|---|
| a | b | c | d | e |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Self Assessment GG tahun lalu | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Self Assessment GG |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Assessment MR tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Assessment MR |
| | | Tercapainya Tingkat Keandalan Sistem Pengendalian Intern | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Laporan Audit Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Interna tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | 1. Program Kerja dan Audit Tahunan (PKAT) 2. Laporan Auditor Internal 3. Laporan pemuakhiran temuan auditor internal | 1. Laporan Audit Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP) | | 3. Laporan Pengawasan Eksternal/Internal 4. Laporan pemuakhiran temuan pengawasan eksternal/internal |

Sumber data untuk penetapan dan penilaian IPK BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 3. Sumber Data Penetapan dan Penilaian IPK BPJS Ketenagakerjaan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Total Peserta Aktif | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Penerimaan Iuran | Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Database pelayanan JHT | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Database pelayanan JKM | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Database pelayanan JKK | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Database pelayanan JP | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Peraturan Perundang-Undangan 4. Database Pelayanan Kartu Peserta | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan Kartu Peserta |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (akumulasi) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database pelayanan Kartu Peserta |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|---|---|---|---|--|
| a | b | c | d | e |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat kepuasan peserta | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Konsultan Independen | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| | | Tingkat Penyelesaian pengaduan masyarakat | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. SOP/SPM 3. Database Jumlah Hari Pelayanan Tagihan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| | | Tingkat Kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat | | |
| II. Perspektif Keuangan | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor standar Kesehatan Keuangan Aset | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tercapainya Opini Auditor | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | |
| 1 | Membangun kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholder s | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Surat penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Surat Pengantar/Management Letter Auditor Eksternal 4. Laporan Auditor Eksternal |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Klipping Media Cetak 4. Website Perusahaan |
| | | Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan keuangan aset BPJS | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Surat Pengantar/Management Letter Auditor Eksternal 4. Laporan Auditor Eksternal |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Peraturan Perundang-Undangan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Database Peserta |
| IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Database peserta 3. Database karyawan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Database peserta 4. Database karyawan |
| | | Tingkat keterikatan pegawai | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Konsultan Independen tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Konsultan Independen |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Tercapainya IT Readiness Level | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Audit IT tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Audit IT |
| | | Progress Otomasi Proses Bisnis | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Audit IT tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Audit IT |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Sumber Data Target | Sumber Data Realisasi |
|---|---|---|--|---|
| a | b | c | d | e |
| IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Self Assessment GG tahun lalu | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Self Assessment GG |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 3. Laporan Assessment MR tahun sebelumnya | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan 3. Laporan Assessment MR |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Audit Coverage oleh SPI | Rencana kerja dan Anggaran Tahunan | 1. Laporan Audit Kinerja 2. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | 1. Program Kerja dan Audit Tahunan (PKAT) 2. Laporan Internal/Auditor Internal/Eksternal 3. Laporan penuntasan temuan auditor internal/eksternal | 1. Laporan Manajemen/Tahunan 2. Laporan Audit Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern 3. Laporan Manajemen/Tahunan |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK dan KAP) | | 4. Laporan Pengawasan Eksternal / Internal 5. Laporan penuntasan temuan Pengawasan eksternal / Internal |

BAB VI PENETAPAN BOBOT

A. DASAR PERTIMBANGAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Asas
 - a. Kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
 - b. Manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
 - c. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat idiil.
2. Prinsip
 - a. Kegotongroyongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
 - b. Nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
 - c. Keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
 - d. Kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
 - e. Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

- h. Dana Amanat, adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
- i. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

B. TATA CARA PENETAPAN BOBOT

Langkah penetapan bobot dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat tabel yang terdiri dari 7 kolom, meliputi; Nomor, Aspek Penilaian, Formula, Asas SJSN, Prinsip SJSN, Jumlah, Bobot.
2. Pengisian kolom;
 - a. Kolom nomor diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom aspek penilaian diisi dengan aspek-aspek penilaian yang ditetapkan pada tahun penilaian
 - c. Kolom formula diisi dengan formula aspek penilaian
 - d. Kolom asas diisi dengan pemenuhan asas SJSN dari aspek penilaian
 - e. Kolom prinsip diisi dengan pemenuhan prinsip SJSN dari aspek penilaian
 - f. Kolom jumlah diisi dengan jumlah asas dan prinsip SJSN
 - g. Menghitung bobot:
 - 1) Mengisi kolom total dengan menjumlahkan asas dan prinsip SJSN pada masing-masing aspek penilaian.
 - 2) Bobot untuk masing-masing aspek penilaian adalah persentase jumlah terhadap total.

Tabel 4. Simulasi Penetapan Bobot Standar Kesehatan Keuangan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

| No. | Aspek Penilaian | Formula | Asas | Prinsip | Jumlah | Bobot |
|-----|---|---|---------|-----------------------------------|----------|------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 3 | Likuiditas | $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$ | | Pengelolaan Dana | 1 | 12,5 |
| 4 | Solvabilitas | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$ | | Pengelolaan Dana | 1 | 12,5 |
| 5 | Yield On Investment BPJS | $\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata-rata Investasi Netto}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 37,5 |
| 6 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 37,5 |
| | Total | | | | 8 | 100 |

Tabel 5. Simulasi Penetapan Bobot IPK BPJS Kesehatan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Asas | Prinsip | Jumlah | Bobot |
|---|-------------------------------------|--|---------|---------------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Tercapainya jumlah peserta JKN | Manfaat | Kepesertaan | 2 | 6,5 |
| | | Tercapainya penambahan peserta baru | Manfaat | Kepesertaan | 2 | 6,5 |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP | Manfaat | Kepesertaan | 2 | 6,5 |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKMTL | Manfaat | Kepesertaan | 2 | 6,5 |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan | Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya Rasio Klaim | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (akumulasi) | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat kepuasan peserta | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Pengaduan peserta di kontak layanan BPJS Kesehatan yang diselesaikan | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | | 14 | 45,2 |
| II. Perspektif Keuangan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset | Manfaat | Akuntabilitas | 2 | 6,5 |
| | | Tercapainya Opini Auditor | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | | 3 | 9,7 |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | |
| 1 | Akuntabilitas Pengelolaan | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun sebelumnya | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tabrnan | | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) (Pemadanan data dengan dukcapil/ yang ada data) | | Kepesertaan | 1 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 4 | 12,8 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Asas | Prinsip | Jumlah | Bobot |
|--|---|---|------|---------------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | | Kepesertaan | 1 | 3,3 |
| | | | | Kepesertaan | 1 | 3,3 |
| | | Employee management index | | Akuntabilitas | 1 | 3,3 |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Ketersediaan sistem | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tingkat efektivitas IT Governance | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya Tingkat Keandalan Sistem Pengendalian Intern | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (JNSN, BPK, OJK, dan KAP) | | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 10 | 32,3 |
| TOTAL | | | | | 31 | 100 |

Tabel 6. Simulasi Penetapan Bobot Standar Kesehatan Keuangan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

| No. | Aspek Penilaian | Formula | Asas | Prinsip | Jumlah | Bobot |
|--------------|---|--|---------|--------------------------------|-----------|---------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 | Likuiditas | $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$ | | Pengelolaan Dana | 1 | 3,3 |
| 2 | Solvabilitas | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$ | | Pengelolaan Dana | 1 | 3,3 |
| 3 | Yield On Investment | $\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata-rata Investasi Netto}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| 4 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| 5 | Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun | $\frac{\text{Jumlah Aktiva Bersih}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana | 2 | 6,7 |
| 6 | Klaim Rasio Dana JKK | $\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana | 2 | 6,7 |
| 7 | Klaim Rasio Dana JKm | $\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana | 2 | 6,7 |
| 8 | Kemampuan Pembayaran JHT | $\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jatuh Tempo}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| | | $\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| 9 | Efektivitas Pembayaran JHT (%) | $\frac{\text{Jumlah JHT yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah JHT yang Jatuh Tempo}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| 10 | Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) | $\frac{\text{Aktiva Bersih (t) - Aktiva Bersih (t-1)}}{\text{Aktiva Bersih (t-1)}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 2 | 6,7 |
| 11 | Efektivitas Pembayaran Pensiun | $\frac{\text{Jumlah Pensiun yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah Pensiun yang Jatuh Tempo}}$ | Manfaat | Pengelolaan Dana Akuntabilitas | 3 | 10,0 |
| 12 | Kolektibilitas Iuran | $\frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Pendapatan Iuran}}$ | Manfaat | Akuntabilitas | 2 | 6,6 |
| Total | | | | | 30 | 100,00 |

Tabel 7. Simulasi Penetapan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Asas | Prinsip | Jumlah | Bobot |
|--|--|---|---------|---------------------------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I Perspektif Pelanggan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Total Peserta Aktif | Manfaat | Kepesertaan | 2 | 6,5 |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatnya penyelesaian Klaim JHT proses | - | Keterbukaan | 1 | 3,3 |
| | | Meningkatnya penyelesaian Klaim JKM proses | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Meningkatnya penyelesaian Klaim JKK proses | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Meningkatnya penyelesaian Klaim JP proses | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Meningkatnya penyelesaian Kartu Peserta proses | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (Akumulasi) | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat kepuasan peserta | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | | 11 | 35,4 |
| II Perspektif Keuangan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset | Manfaat | Akuntabilitas | 2 | 6,5 |
| | | Tercapainya Opini Auditor | - | Akuntabilitas Keterbukaan | 2 | 6,5 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | | 4 | 13,0 |
| III Perspektif Proses Internal | | | | | | |
| 1 | Membangun kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholders | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | - | Akuntabilitas | 1 | 3,3 |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | - | Keterbukaan | 1 | 3,2 |
| | | Ketepatan waktu penyusunan laporan perbitungan kesehatan keuangan aset BPJS | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) | - | Kepesertaan | 1 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 5 | 16,1 |
| IV Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | - | Kepesertaan | 1 | 3,3 |
| | | Tingkat keterikatan pegawai | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Tercapainya IT Readiness Level | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Progres Otomasi Proses Bisnis | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Audit Coverage oleh SPI | - | Akuntabilitas | 1 | 3,2 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | Manfaat | Akuntabilitas | 2 | 6,5 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal | Manfaat | Akuntabilitas | 2 | 6,5 |
| Sub Total Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 11 | 35,5 |
| TOTAL | | | | | 31 | 100 |

C. KOORDINASI PENETAPAN

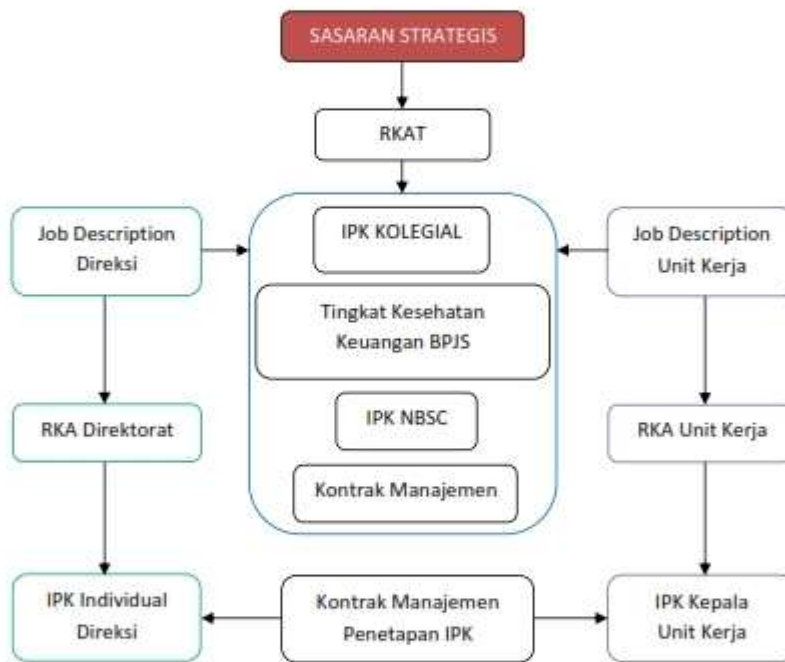
1. DJSN berkoordinasi dengan masing-masing BPJS untuk menetapkan;
 - a. aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan/indikator pencapaian kinerja;
 - b. bobot;
 - c. target.
2. Hasil penetapan dituangkan dengan Keputusan DJSN setiap tahun.

**BAB VII
PROSES PENETAPAN DAN PENILAIAN**

A. Proses Penetapan

Penyusunan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang dilakukan berdasarkan sasaran strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2 Penetapan IPK



Dalam penetapan Indikator Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Job Description Direksi, dapat dilakukan penurunan kepada IPK Direktorat dan Unit Kerja.

B. Proses Penilaian

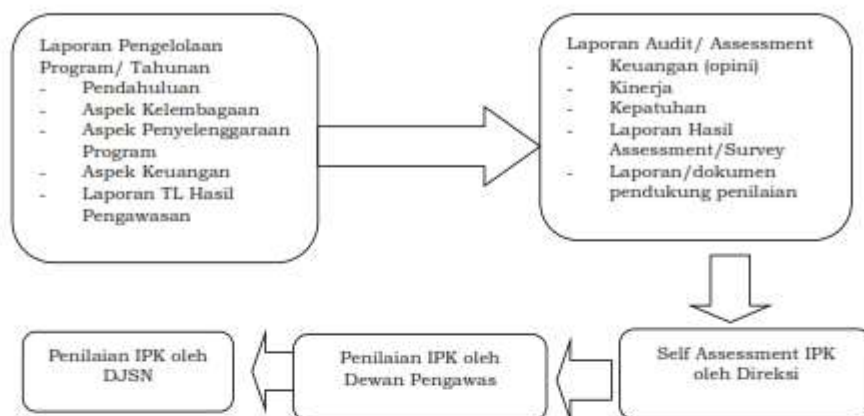
Penilaian IPK Direksi dalam pembahasan ini adalah posisi Direksi yang bertanggung jawab secara kolegiat sesuai dengan tingkat kesehatan keuangan dan kontrak manajemen yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada saat penetapan RKAT BPJS Kesehatan.

1. Langkah Penetapan Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS
 - a. Menetapkan Aspek Penilaian yang mewakili terhadap seluruh kinerja keuangan BPJS.
 - b. Menetapkan besarnya bobot untuk masing-masing aspek dengan memperhatikan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c. Menetapkan target sesuai dengan RKAT, dan dalam hal tidak secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis BPJS Ketenagakerjaan atau dokumen lainnya.
2. Langkah Penilaian Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS
 - a. Menetapkan nilai realisasi masing-masing aspek indikator berdasarkan laporan audit dan/atau laporan hasil dari pihak independen.
 - b. Dalam hal penilaian standar kesehatan keuangan aset telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, peranan DJSN melakukan *peer review* terhadap standar kesehatan keuangan aset.
3. Langkah Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS
 - a. Menetapkan Indikator Penilaian Kinerja (IPK) yang mewakili seluruh kinerja BPJS.
 - b. Menetapkan bobot untuk setiap IPK dengan memperhatikan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c. Menetapkan target sesuai dengan dokumen di RKAT, dalam hal tidak secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis BPJS Ketenagakerjaan atau dokumen lainnya.
4. Langkah Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS

Penilaian IPK BPJS dilakukan dengan menilai laporan evaluasi kinerja pengelolaan program dan laporan keuangan. Untuk memenuhi tingkat kehandalan (*reliability*), Penilaian IPK BPJS dilakukan berdasarkan laporan pengelolaan program (yang didalamnya termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta laporan pendukung lainnya sesuai dengan hasil *assessment* oleh pihak independen.

Skema penilaian dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Skema Penilaian IPK



BAB VIII SIMULASI

A. SIMULASI PENETAPAN TARGET STANDAR KESEHATAN KEUANGAN

1. BPJS Kesehatan

Dari 4 (empat) aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan, dapat diambil seluruhnya atau sebagian, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan BPJS Kesehatan pada tahun yang bersangkutan.

Simulasi penetapan bobot dan target tingkat kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan dapat dilihat pada tabel 8. Dalam simulasi ini penilaian dilakukan terhadap semua aspek.

Tabel 8. Simulasi Penetapan Target Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan

| No | Aspek Penilaian | Target | Satuan | Bobot | Formula |
|--------------|---|--------|--------|------------|---|
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | Likuiditas | 617,42 | % | 12,5 | $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$ |
| 2 | Solvabilitas | 582,94 | % | 12,5 | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$ |
| 3 | Yield On Investment BPJS | 8,20 | % | 37,5 | $\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata - Rata Investasi Netto}}$ |
| 4 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 98,04 | % | 37,5 | $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ |
| Total | | | | 100 | |

2. BPJS Ketenagakerjaan

Dari dua belas aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan, dapat diambil seluruhnya atau sebagian, disesuaikan dengan kondisi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Simulasi penetapan bobot dan target tingkat kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 9. Dalam simulasi ini penilaian dilakukan terhadap semua indikator.

**Tabel 9. Simulasi Penetapan Target Tingkat Kesehatan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan**

| No. | Aspek Penilaian | Formula | Target | Satuan | Bobot |
|----------|---|---|----------|----------|---------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |
| 1 | Likuiditas | $\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$ | 865,48 | % | 3,3 |
| 2 | Solvabilitas | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$ | 536,08 | % | 3,3 |
| 3 | Yield On Investment BPJS | $\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata - Rata Investasi Netto}}$ | 6,65 | % | 10,0 |
| 4 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ | 103,28 | % | 10,0 |
| 5 | Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun | $\frac{\text{Jumlah Aktiva Bersih}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$ | 9.653,04 | % | 6,7 |
| 6 | Klaim Rasio Dana JKK | $\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$ | 20,26 | % | 6,7 |
| 7 | Klaim Rasio Dana JKm | $\frac{\text{Jumlah Pembayaran Jaminan}}{\text{Jumlah Penerimaan Iuran}}$ | 35,58 | % | 6,67 |
| 8 | Kemampuan Pembayaran JHT | $\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jatuh Tempo}}$ | 1.199,90 | % | 10,0 |
| | | $\frac{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$ | 1.199,85 | % | 10,0 |
| 9 | Efektivitas Pembayaran JHT | $\frac{\text{Jumlah JHT yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah JHT yang Jatuh Tempo}}$ | 500 | % | 10,0 |
| 10 | Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) | $\frac{\text{Aktiva Bersih (t) - Aktiva Bersih (t - 1)}}{\text{Aktiva Bersih (t - 1)}}$ | 109,39 | % | 6,7 |
| 11 | Efektivitas Pembayaran Pensiun | $\frac{\text{Jumlah Pensiun yang Dibayarkan}}{\text{Jumlah Pensiun Jatuh Tempo}}$ | 70,19 | % | 10,0 |
| 12 | Kolektibilitas Iuran | $\frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Pendapatan Iuran}}$ | 1,19 | % | 6,6 |
| | Total | | | | 100,00 |

B. SIMULASI PENETAPAN TARGET INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA (IPK)

Simulasi penetapan target Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 10 dan BPJS Ketenagakerjaan pada Tabel 11.

Tabel 10. Simulasi Penetapan Target Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Formula |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--------|-------|--|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Tercapainya jumlah peserta JKN | 154.309 | Jiwa | 6,5 | Total jumlah peserta yang ditargetkan dalam RKAT. |
| | | Tercapainya penambahan peserta baru | 5.963.685 | Jiwa | 6,5 | Jumlah penambahan peserta baru (PBI Daerah, Non-PBI dan Non-PPU Pemerintah) yang ditargetkan dalam RKAT. |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP | 85 | % | 6,5 | Perbandingan terhadap jumlah FKTP yang telah memenuhi ketentuan Pemerintah. |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL | 90 | % | 6,5 | Perbandingan terhadap jumlah FKRTL yang telah memenuhi ketentuan Pemerintah. |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit | 1.000 | Jiwa | 3,2 | $\frac{\text{Jumlah Peserta}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$ |
| | | Tercapainya Rasio Klaim | 101,79 | % | 3,2 | $\frac{\text{Realisasi Biaya Pelayanan}}{\text{Realisasi Penerimaan Iuran}}$ |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS | 515 | Unit | 3,2 | Akumulasi unit pelayanan BPJS yang ditargetkan dalam RKAT. |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Formula |
|--|----------------------------------|--|--------|------------|-------|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat Kepuasan Peserta | 80 | % | 3,2 | Hasil Survey Kepuasan Peserta (survey populasi) |
| | | Pengaduan peserta di kontak layanan BPJS Kesehatan yang diselesaikan | 92 | % | 3,2 | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}}$ |
| | | Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti | 92 | % | 3,2 | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}}$ |
| | | Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | 95,2 |
| II. Perspektif Keuangan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset | 100 | Skor | 6,5 | Mengacu pada akumulasi target tingkat kesehatan keuangan |
| | | Tercapainya Opini Auditor | 100 | Skor | 3,2 | Opini auditor Independen WTP: 100 WTP PP: 90 WDP: 80 Disclaimer/No Opini: 50 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | 9,7 | | |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | |
| 1 | Akuntabilitas Pengelolaan | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima Sebelum 31 Oktober: 120% x bobot Diterima Pada 31 Oktober: 100% x bobot Diterima Setelah 31 Oktober: 0 |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun sebelumnya | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima Sebelum 30 Juni: 120% x bobot Diterima Pada 30 Juni: 100% x bobot Diterima Setelah 30 Juni: 0 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Formula |
|--|---|---|--------|-----------|-------------|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | |
| 1 | Akuntabilitas Pengelolaan | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima Sebelum 31 Juli: 120% x bobot Diterima Pada 31 Juli: 100% x bobot Diterima Setelah 31 Juli: 0 |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD)(Pemadanan data dengan dukcapil /yang ada data) | 100 | % | 3,2 | Data peserta yang valid Seluruh data Peserta |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 12,8 | |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | 23.399 | Jwa | 3,3 | Jumlah Peserta Jumlah Pegawai |
| | | Employee management index | 9,57 | Rp Miliar | 3,3 | Jumlah Pendapatan luran Jumlah Pegawai |
| | | | 75 | % | 3,3 | Hasil survey engagement pegawai |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Ketersediaan Sistem | 99,6 | % | 3,2 | Diukur berdasarkan hasil monitoring aplikasi |
| | | Tingkat efektivitas IT Governance | 3 | Skor | 3,2 | Diukur berdasarkan standar COBIT 5 |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | 87 | Skor | 3,2 | Diukur berdasarkan hasil assesment oleh BPKP/ Pengawas Internal |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | 2,76 | Skor | 3,2 | Diukur berdasarkan Assessment Governance Risk and Compliance (GRC) dengan skala 0-5 |
| | | Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern | 2,76 | Skor | 3,2 | 5.00 : Leadership 4.00 - 4.99 : Managed 3.00 - 3.99 : Repeatable 2.00 - 2.99 : Initial 0.00 - 1.99 : adhoc |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | 92 | % | 3,2 | Hasil Pengawasan Internal dilakukan oleh SPI |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal | 92 | % | 3,2 | Hasil Pengawasan eksternal oleh DJSN, BPK, KAP dan OJK. |
| Sub Total Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 32,3 | |
| TOTAL | | | | | 100 | |

Tabel 11. Penetapan Target Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Formula |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------|--------|-------|--|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I. Perspektif Pelayanan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Total peserta aktif | 25.207.545 | Jwa | 6,5 | Akumulasi peserta aktif yang ditargetkan dalam RKAT |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT | 5 | Skor | 3,3 | Paling lambat 5 hari kerja Kurang dari 5 hari kerja: 120% x bobot 5 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 5 hari kerja : 0 |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat 3 hari kerja Kurang dari 3 hari kerja: 120% x bobot 3 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 3 hari kerja : 0 |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK | 7 | Skor | 3,2 | Paling lambat 7 hari kerja Kurang dari 7 hari kerja: 120% x bobot 7 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 7 hari kerja : 0 |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP | 15 | Skor | 3,2 | Paling lambat 15 hari kerja Kurang dari 15 hari kerja: 120% x bobot 15 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 15 hari kerja : 0 |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta | 7 | Skor | 3,2 | Paling lambat 7 hari kerja Kurang dari 7 hari kerja: 120% x bobot 7 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 7 hari kerja : 0 |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (akumulasi) | 100 | Unit | 3,2 | Berdasarkan target akumulasi unit pelayanan BPJS dalam RKAT. |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|--------|--------|-------------|--|
| a | b | c | g | e | f | d |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat kepuasan peserta | 90 | % | 3,2 | Hasil Survey Kepuasan Peserta |
| | | Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | % | 3,2 | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}}$ |
| | | Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat | 5 | Skor | 3,2 | Paling lambat 5 hari kerja Kurang dari 5 hari kerja: Maksimal 120% x bobot 5 hari kerja : 100% x bobot Lebih dari 5 hari kerja : 0 |
| Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | | 35,4 | |
| II. Perspektif Keuangan | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor standar Kesehatan Keuangan Aset | 100 | Skor | 6,5 | Target mengacu pada target akumulatif tingkat kesehatan keuangan |
| | | Tercapainya Opini Auditor | 100 | Skor | 6,5 | Opini auditor Independen WTM: 100 WTP PP: 90 WDM: 80 Disclaimer/No Opini : 50 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | | 13,0 | |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | |
| 1 | Membangun kepastuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholders | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | 3 | Skor | 3,3 | Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima sebelum 31 Oktober : 120% x bobot Diterima pada 31 Oktober : 100% x bobot Diterima setelah 31 Oktober : 0 |
| | | Ketepatan waktu penributan laporan keuangan audit | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima sebelum 30 Juni : 120% x bobot Diterima pada 30 Juni : 100% x bobot Diterima setelah 30 Juni : 0 |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima sebelum 31 Juli : 120% x bobot Diterima pada 31 Juli : 100% x bobot Diterima setelah 31 Juli : 0 |
| | | Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan keuangan aset BPJS | 3 | Skor | 3,2 | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Diterima sebelum tanggal 15 bulan berikutnya : 120% x bobot Diterima pada tanggal 15 bulan berikutnya : 100% x bobot Diterima setelah tanggal 15 bulan berikutnya : 0 |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) | 96 | % | 3,2 | Data peserta yang valid Seluruh data Peserta |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 16,1 | |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Target | Satuan | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|--------|------------|-------------|---|
| a | b | c | g | e | f | d |
| IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SOM | Produktivitas pegawai | 4.476 | Jwa | 3,3 | $\frac{\text{Jumlah TK Peserta aktif}}{\text{Jumlah Karyawan}}$ |
| | | Tingkat keterikatan pegawai | 100 | % | 3,2 | Hasil survey engagement pegawai |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Tercapainya IT Readiness Level | 2 | Skor | 3,2 | Diukur berdasarkan kesiapan IT untuk menunjang BPJS Ketenagakerjaan |
| | | Progres Otomasi Proses Bisnis | 11 | Sub Sistem | 3,2 | Jumlah otomasi proses bisnis yang ditargetkan |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | 94 | % | 3,2 | Untuk tahun 2019 diukur berdasarkan target dalam RKAT. Mulai tahun 2020 dihitung berdasarkan kesesuaian dengan ISSA Guidelines. |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | 3,305 | Skor | 3,2 | Dihitung berdasarkan capaian maturity level management resiko yang dihitung berdasarkan COSO ERM |
| | | Audit Coverage oleh SPI | 40 | Auditee | 3,2 | Jumlah Auditee yang ditargetkan dalam RKAT |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | 100 | % | 6,5 | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$ |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (DASN, BPK, CJK dan KDJ) | 100 | % | 6,5 | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$ |
| Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 35,5 | |
| TOTAL | | | | | 100 | |

C. SIMULASI PENILAIAN STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET JAMINAN SOSIAL

Dalam melakukan penilaian terhadap standar kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja, nilai maksimal ditetapkan sebesar 120%. Jika hasil penilaian lebih besar dari 120% maka yang dipakai adalah angka 120%.

1. BPJS Kesehatan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Kesehatan perlu dilakukan penilaian standar Kesehatan Keuangan aset yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan oleh BPJS.

Tabel 12. Simulasi Penilaian Standar Kesehatan Keuangan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

| No | Aspek Penilaian | Formula Penilaian | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|--------------------|---|---|--------|------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 3 | Likuiditas | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 12,5 | 617,4 | 745,1 | 15,1 |
| 4 | Solvabilitas | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 12,5 | 582,9 | 516,5 | 11,1 |
| 5 | Yield On Investment BPJS | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 37,5 | 8,2 | 11,2 | 45 nilai maksimal 120% x bobot |
| 6 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | % | 37,5 | 98,0 | 92,2 | 39,9 |
| Total | | | | 100 | | | 111,1 |
| KLASIFIKASI | | | | | | | BANGAT SEHAT |

2. BPJS Ketenagakerjaan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan penilaian standar Kesehatan Keuangan aset yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Tabel 13. Simulasi Penilaian Standar Kesehatan Keuangan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

| No. | Aspek Penilaian | Formula Penilaian | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|--------------------|---|---|--------|---------------|---------|-----------|--------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Likuiditas | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,3 | 865,5 | 639,8 | 2,4 |
| 2 | Solvabilitas | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,3 | 536,1 | 570,3 | 3,5 |
| 3 | Yield On Investment BPJS | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 10,0 | 6,6 | 6,6 | 10,0 |
| 4 | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | % | 10,0 | 103,3 | 73,8 | 12,0 |
| 5 | Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun Jamina Pensiun | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,7 | 9.653,0 | 5.238,4 | 3,6 |
| 6 | Klaim Rasio Dana JKK | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,7 | 20,3 | 20,9 | 6,9 |
| 7 | Klaim Rasio Dana JKm | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,7 | 35,6 | 28,9 | 5,4 |
| 8 | Kemampuan Pembayaran JHT | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 10,0 | 1.199,9 | 1.406,8 | 11,7 |
| | | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 10,0 | 1.199,8 | 1.406,3 | 11,7 |
| 9 | Efektivitas Pembayaran JHT | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 10,0 | 500 | 558,5 | 11,2 |
| 10 | Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,7 | 109,4 | 109,5 | 6,7 |
| 11 | Efektivitas Pembayaran Pensiun | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 10,0 | 70,2 | 78,2 | 11,1 |
| 12 | Kolektibilitas iuran | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | % | 6,6 | 1,2 | 0,3 | 7,9 |
| Total | | | | 100,00 | | | 104,1 |
| KLASIFIKASI | | | | | | | SEHAT |

D. SIMULASI PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BPJS

1. BPJS KESEHATAN

Tabel 14. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula Penilaian | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Perspektif Pelanggan | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Tercapainya jumlah peserta JKN | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Jwa | 6,5 | 154.309 | 154.309 | 6,5 |
| | | Tercapainya penambahan peserta baru | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Jwa | 6,5 | 5.963.685 | 3.251.512 | 3,5 |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,5 | 85 | 112,97 | 7,8 nilai maksimal 120% x bobot |
| | | Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,5 | 90 | 80 | 5,8 |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | jwa | 3,2 | 1.000 | 939,01 | 3,4 |
| | | Tercapainya Rasio Klaim | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | % | 3,2 | 101,79 | 113,50 | 2,7 |
| | | Tercapainya Unit Pelayanan BPJS | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Unit | 3,2 | 515 | 515 | 3,2 |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat Kepuasan Peserta | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 80 | 79,5 | 3,2 |
| | | Pengaduan peserta di kontak layanan BPJS Kesehatan yang diselesaikan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 92 | 99,58 | 3,5 |
| | | Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 92 | 99,58 | 3,5 |
| Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | | 45,2 | | | 43,1 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|--|--|---|---|-----------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Perspektif Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 6,5 | 100 | 106,44 | 6,9 |
| | | Tercapainya Opini Auditor | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 100 | 100 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | | 9,7 | | | 10,1 |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | | | |
| 1 | Akuntabilitas Pengelolaan | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,8 nilai maksimal 120% x bobot |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,8 nilai maksimal 120% x bobot |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,8 nilai maksimal 120% x bobot |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) (Pemadanan data dengan dukcapil/yang ada data) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 100 | 87,36 | 2,8 |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 12,8 | | | 14,2 |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Jwa | 3,3 | 23.399 | 26.145 | 3,7 |
| | | | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Rp Miliar | 3,3 | 100 | 100 | 3,3 |
| | | Employee management index | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,3 | 75 | 75,56 | 3,3 |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Ketersediaan sistem | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 99,2 | 99,03 | 3,2 |
| | | Tingkat efektivitas IT Governance | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 100 | 114 | 3,6 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|--|---|---|---|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| IV. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 85 | 85,63 | 3,2 |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 2,8 | 2,86 | 3,3 |
| | | Tercapainya Tingkat Keahlian Sistem Pengendalian Intern | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 46 | 55,52 | 3,7 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 92 | 98,96 | 3,4 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJE dan KAP) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 92 | 53,51 | 1,9 |
| Sub Total Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 32,3 | | | 32,0 |
| TOTAL | | | | | 100 | | | 100 |
| KLASIFIKASI | | | | | | | | |
| SAGAT BEHAY | | | | | | | | |

2. BPJS KETENAGAKERJAAN

Tabel 15. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|-------------|------------|------------|--|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| I. Perspektif Pelanggan | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Operasional | Total peserta aktif | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Jwa | 6,5 | 25.207.545 | 26.242.032 | 6,8 |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Layanan | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,3 | 5 | 3 | $\frac{4}{\text{nilai maksimal } 120\% \times \text{bobot}}$ |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 2 | $\frac{3,8}{\text{nilai maksimal } 120\% \times \text{bobot}}$ |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKE | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 7 | 43 | Catatan: lebih dari target 7 hari kerja |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 15 | 30 | Catatan: lebih dari target 15 hari kerja |
| | | Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 7 | 11,92 | Catatan: lebih dari target 15 hari kerja |
| | | Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BRIS | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Unit | 3,2 | 100 | 100 | 3,2 |
| 3 | Peningkatan Kepuasan Peserta | Tingkat kepuasan peserta | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 90 | 90,71 | 3,2 |
| | | Tingkat Penyelesaian pengaduan masyarakat | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 100 | 100 | 3,2 |
| | | Tingkat Kecepatan Penyelesaian pengaduan masyarakat | $\frac{Target}{Realisasi} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 5 | 2,12 | $\frac{3,8}{\text{nilai maksimal } 120\% \times \text{bobot}}$ |
| Sub Total Perspektif Pelanggan | | | | | 35,4 | | | 38,0 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|---|--|---|---|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| II. Perspektif Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan | Tercapainya Skor standar Kesehatan Keuangan Aset | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 6,5 | 100 | 93,06 | 6,0 |
| | | Tercapainya Opini Auditor | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 6,5 | 100 | 100 | 6,5 |
| Sub Total Perspektif Keuangan | | | | | 13 | | | 12,5 |
| III. Perspektif Proses Internal | | | | | | | | |
| 1 | Membangun kepatuhan BRJS dalam memenuhi kepentingan stakeholders | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada Kementerian Keuangan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,3 | 3 | 3,6 | 4,0 |
| | | Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,8 |
| | | Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,8 |
| | | Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan keuangan aset BRJS | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 10 | 10 | 3,2 |
| | | Kehandalan Database Peserta (KD) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 96 | 95,24 | 3,2 |
| Sub Total Perspektif Proses Internal | | | | | 16,1 | | | 18,0 |
| IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan produktivitas SDM | Produktivitas pegawai | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Jwa | 3,3 | 4.476 | 4.659 | 3,4 |
| | | Tingkat keterikatan pegawai | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 100 | 99,87 | 3,2 |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Tercapainya IT Readiness Level | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 2 | 2 | 3,2 |

| No. | Sasaran Strategis | IPK | Formula | Satuan | Bobot | Target | Realisasi | Nilai |
|---|---|---|---|------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi | Progres Otomasi Proses Bisnis | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Sub Sistem | 3,2 | 11 | 9 | 2,6 |
| 3 | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola | Tercapainya Skor Good Governance (GG) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 3,2 | 94 | 95,54 | 3,2 |
| | | Tercapainya maturity level Manajemen Risiko | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Skor | 3,2 | 3,305 | 3,42 | 3,3 |
| | | Audit Coverage oleh SPI | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | Auditee | 3,2 | 40 | 46,5 | 3,7 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,5 | 100 | 59 | 3,8 |
| | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK dan KAP) | $\frac{Realisasi}{Target} \times Bobot$ | % | 6,5 | 100 | 90,00 | 5,8 |
| Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran | | | | | 35,5 | | | 32,2 |
| TOTAL | | | | | 100 | | | 90,7 |
| KLASIFIKASI | | | | | | | | BERAT |

E. Hasil Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan dengan mengkombinasikan klasifikasi penilaian tingkat kesehatan keuangan dengan klasifikasi penilaian IPK secara proporsional. Tingkat proporsional didasarkan pada jumlah indikator yang digunakan dalam penilaian.

Dalam contoh simulasi penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan, jumlah indikator tingkat kesehatan keuangan sebanyak 12 item dan jumlah indikator IPK sebanyak 24 item. Dengan demikian porsi penilaian untuk tingkat kesehatan keuangan adalah 33,33% (dibulatkan menjadi 30%) dan porsi penilaian untuk IPK adalah 66,66% (dibulatkan menjadi 70%).

Hasil perhitungan kombinasi nilai adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nilai tingkat kesehatan keuangan | : 84,65 x 30% = 25,39 |
| Nilai IPK | : 95,76 x 70% = 67,03 |
| Hasil Penilaian Akhir | : 92,42 |

Berdasarkan hasil penilaian akhir, kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 92,42 termasuk klasifikasi "Sehat".

BAB IX
KEGUNAAN HASIL PENILAIAN

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), DJSN adalah pengawas eksternal BPJS. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur bahwa yang diawasi oleh DJSN adalah Kinerja BPJS.

Menurut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan BPJS dan DJS.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS menjadi bagian dari Laporan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh DJSN.

B. PEMBERIAN INSENTIF

1. Alokasi Dana Insentif

Alokasi dana insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS berdasarkan Skor Indikator Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan penilaian selama tahun buku berjalan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Capaian Skor IPK diatas 100, insentif yang diberikan maksimal 100% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- b. Capaian Skor IPK dibawah 100, insentif yang diberikan sesuai dengan capaian skor IPK

2. Komposisi Insentif

Menurut Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa komposisi pemberian insentif Direksi dan Dewan Pengawas BPJS ditetapkan sebagai berikut:

- Direktur Utama = 100%
- Anggota Direktur = 90% dari Direktur Utama
- Ketua Dewan Pengawas = 60% dari Direktur Utama
- Anggota Dewan Pengawas = 54% dari Direktur Utama

3. Simulasi Pemberian Insentif

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Penilaian Kinerja diperoleh skor sebesar 92,42, maka dilakukan simulasi jumlah insentif yang diterima untuk masing – masing anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan anggaran insentif dalam RKAT sebesar Rp.500.000.000, maka jumlah insentif yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas pada tahun yang bersangkutan yaitu $92\% \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}460.000.000$ dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Jabatan | Insentif | Jumlah Personil | Pembilang | Total insentif | Insentif Personil |
|--------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| a | b | c | d | $e = c \times d$ | $f = e / 1.024 \times 460 \text{ jt}$ | $g = f / d$ |
| 1 | Direktur Utama | 100 | 1 | 100 | 44.921.875 | 44.921.875 |
| 2 | Anggota Direksi | 90 | 6 | 540 | 242.578.125 | 40.429.688 |
| 3 | Ketua Dewan Pengawas | 60 | 1 | 60 | 26.953.125 | 26.953.125 |
| 4 | Anggota Dewan Pengawas | 54 | 6 | 324 | 145.546.875 | 24.257.813 |
| Total | | | | 1.024 | 460.000.000 | |

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TB ACHMAD CHOESNI